



KEJATUHAN

PADA hari Jumat (11/2/2011) Wakil Presiden Mesir, Omar Suleiman, menyatakan mundurnya Husni Mubarak dari kursi kepresidenan setelah digoncang demonstrasi selama 18 hari. Awalnya Mubarak enggan mundur karena September tahun ini toh akan dilakukan pemilihan presiden. Dan ia berjanji tidak akan ikut pemilihan itu.

Rakyat Mesir tidak percaya lagi. Tidak ada lagi kompromi. Sang Presiden harus mundur. Ia sudah terlalu lama memegang kekuasaan dan sudah terlalu banyak memperkaya diri.

Kejatuhan Presiden Mesir merupakan kejatuhan presiden di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, setelah sebelumnya rakyat Tunisia menggulingkan presidennya, dengan alasan yang hampir sama: terlalu lama berkuasa dan korup, memperkaya diri.

Tampaknya, penggulingan kepala pemerintahan negara-negara berbahasa Arab ini merupakan efek domino yang bakal menjalar ke negara-negara lain. Kini, manakala artikel ini ditulis, Libia tengah didera demonstrasi hebat yang diperkirakan telah merenggut korban lebih dari 1000 orang akibat terjadi bentrok antara pihak yang menginginkan Khadafi mundur dan pihak yang mendukungnya.

Negara lain juga tengah dilanda demonstrasi serupa: Yaman, Bahrain, Jordania, Aljazair, Maroko, dan tidak menutup kemungkinan negara lain termasuk Saudi Arabia yang kini masih tenang.

Indonesia pernah punya pengalaman serupa pada pemerintahan Presiden Soeharto. Tidak mudah bagi seorang penguasa untuk turun dengan elegan dari kursi kekuasaannya. Rasanya terlalu sayang untuk meninggalkan kekuasaan, sebuah pencapaian yang tidak semua orang bisa meraihnya.

Permasalahannya, kekuasaan itu cenderung korup, yang membuat rakyat (sebagian besar tergolong miskin) merasa diperlakukan tidak adil itu menuntutnya untuk turun. Kejatuhan semacam itu seringkali berujung pada pelarian ke luar negeri sebagai bentuk "deportasi" atau

pada konteks tertentu bisa berupa eksekusi terhadap sang mantan penguasa.

Kekuasaan itu tidak hanya berupa jabatan seorang presiden, perdana menteri, atau raja seperti di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara tersebut, tetapi bisa seperti ketua PSSI atau jabatan-jabatan lainnya. Saya tidak tahu apakah jabatan-jabatan akademik di universitas juga sejajar dengan hal itu?

Pejabat yang bisa meraih posisi puncak kekuasaan tanpa mempersiapkan jalan turun dari panggung kekuasaan bisa dikatakan sebagai pejabat yang terbutakan. Seringkali riwayat kekuasaannya bakal dijatuhkan oleh orang-orang yang awalnya mendukungnya.

Orang-orang semacam ini seringkali tidak tahu atau memang tidak mau tahu kapan sebuah akhir itu bakal terjadi. Tidak mudah untuk menyadarinya. Bahkan yang dulunya tampak sebagai akhir bisa berubah menjadi awal. Atau sebaliknya.

Bukankah bulan Februari dalam sistem kalender yang dulunya menjadi bulan terakhir kini menjadi bulan kedua dalam rentang tahunan? Di bulan yang tidak mencapai jumlah 30 hari inilah penambahan 1 hari pada tahun kabisat dilakukan. Ini karena dulunya Februari adalah bulan terakhir. Seperti halnya penguasa, masa akhir terasa baru saja sebagai awal kekuasaan.

Para penguasa sebaiknya belajar secara filosofis dari para pendaki gunung. Tidak ada seorang pun pendaki gunung yang berketetapan akan tinggal di puncak gunung. Mereka dengan sadar akan mencari jalan turun segera setelah merayakan perjuangan meraih puncak.

Di puncak gunung itu, mungkin mereka akan menancapkan sebuah bendera, saling mengambil foto untuk kenangan dokumentasi, atau sekedar minum untuk menghilangkan haus. Kemudian mereka akan segera turun sebelum cuaca ekstrem menyerang.

Dr. NURHADI, M.Hum.
Pemimpin Redaksi